

**ANALISIS BELANJA DAERAH KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT ANTARA KABUPATEN/KOTA PENGHASIL MIGAS DAN
BUKAN PENGHASIL DI PROVINSI RIAU**

TARYONO

*Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Riau
Kampus Binawidya Jln. HR Subrantas Km 12.5 Pekanbaru 28293*

ABSTRACT

This study aims to determine whether there are regional differences in expenditure (indirect expenditures and direct spending), the level of poverty, and social welfare (income per capita) between regency / city producing and non-producing oil and gas in the province of Riau. The research was carried out in Riau province covering 11 cities and regions, namely 2 9 regency. Analysis by using data from the years 2007-2010 were tested with independent sample t test approach.

The results showed that the average direct expenditure regency / city is not producing oil and gas amounted to Rp 533,661,000 and Rp 1,054,768,688 oil and gas producer. Average indirect spending regency / cities not producing oil and gas amounted to Rp 387,468,667 and Rp 481,808,438 oil and gas producer. The average poverty rate in the regency / city is not producing oil and gas at 11.42% and by 10.58% oil and gas producer. The average per capita income of the non-producing oil and gas amounted to Rp 8,934,917 and Rp 8,222,813 for oil and gas producers. Statistical test results showed that the average direct expenditure between regency / cities non-producing oil and gas producer with significant differences. As for the indirect spending, the level of poverty and the welfare of the regency / city is not producing oil and gas producers there is no significant.

Keyword: Local expenditure, poverty, and social welfare

I. PENDAHULUAN

Diberlakukannya otonomi daerah telah membawa perubahan yang besar dalam pengelolaan tatanan pemerintahan di Indonesia. Melalui otonomi daerah telah terjadi pendelegasian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang lebih besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan diubah menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelimpahan wewenang tersebut juga diikuti dengan desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 25 tahun 1999 dan diubah menjadi undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Diharapkan dengan pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dibutuhkan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Perimbangan keuangan yang demikian menyebabkan daerah-daerah otonom yang kaya akan sumberdaya alam, seperti migas mendapatkan dana bagi hasil migas yang cukup besar. Sehingga daerah-daerah yang kaya sumberdaya alam memiliki kapasitas fiskal yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang tidak kaya sumberdaya alam. Kabupaten/kota di Provinsi Riau yang kaya sumberdaya alam terutama migas adalah Bengkalis, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Pekanbaru. Sedangkan kabupaten/kota bukan penghasil migas adalah Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, dan Dumai. Dana Bagi Hasil bagi kabupaten/kota penghasil migas menjadi cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota bukan penghasil migas di Provinsi Riau.

Dana Bagi Hasil masih merupakan sumber penerimaan terbesar bagi kabupaten/kota di Provinsi Riau yang kaya sumberdaya alam untuk pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi. Ketergantungan kabupaten/kota dalam pendanaan desentralisasi dari dana transfer masih tinggi. Hal ini tercermin dari proporsi dana perimbangan yang sangat tinggi. Bagi kabupaten/kota yang kaya sumberdaya alam, dana perimbangan terutama disuntik dari Dana Bagi Hasil. Misalnya Kabupaten Bengkalis sebagai kabupaten penghasil migas pada tahun 2007 penerimaan Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 1,36 triliun, atau 85,67% dari penerimaan dana perimbangan. Pada tahun 2010 proporsi tersebut meningkat menjadi 99,32% atau meningkat menjadi sebesar Rp. 1,97 triliun. Demikian juga Kabupaten Siak pada tahun 2007 Dana Bagi Hasilnya mencapai Rp. 1,27 triliun atau 92,25% meningkat menjadi 98,72% pada tahun 2010. Kemudian Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2007 mendapatkan Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 1,19 triliun atau 88,83 persen dari dana perimbangan. Proporsi penerimaan Dana Bagi Hasil tersebut meningkat menjadi 98,25% pada tahun 2010.

Sumber-sumber penerimaan Dana Bagi Hasil yang tinggi menjadikan Kabupaten /Kota yang kaya sumberdaya alam terutama sebagai penghasil migas memiliki APBD yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota yang minim sumberdaya alam. Pada tahun 2010 kabupaten/kota penghasil migas, misalnya Kabupaten Bengkalis APBD nya mencapai Rp. 3,01 triliun, Kabupaten Siak sebesar Rp. 1,94 triliun, Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp. 1,63 triliun, Kabupaten Kampar Rp. 1,43 triliun. Jumlah APBD tersebut jauh diatas kabupaten/kota di Provinsi Riau yang bukan penghasil migas, misalnya pada tahun 2010 Kabupaten Indragiri Hilir APBD nya sebesar Rp. 954 milyar, Kuantan Singingi sebesar 846 milyar, dan Dumai sebesar Rp. 701 milyar. Namun demikian, belanja daerah yang tinggi belum sepenuhnya dapat menjamin peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan penduduk. Capaian kinerja penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan antara penghasil migas dan bukan penghasil migas relatif sama. Pada tahun 2010 Kabupaten Bengkalis yang memiliki APBD hampir tiga kali lipat dari Kabupaten Indragiri Hilir tingkat kemiskinan tidak jauh berbeda masing-masing sebesar 8,25% dan 9,41%. Sedangkan tingkat pendapatan perkapitanya lebih tinggi Kabupaten Indragiri Hilir (Rp. 10,15 juta) daripada Kabupaten Bengkalis (Rp. 6,86 juta).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Belanja Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi basil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja terdiri dar belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Berdasarkan kedua jenis belanja tersebut, belanja langsung memiliki memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan kesejahteraan. Jalur yang dapat digunakan adalah melalui peningkatan belanja modal pemerintah daerah. (Hendarmin, 2012).

Dalam era desentralisasi fiskal di mana daerah dituntut untuk bisa melakukan fungsinya secara efektif dan efisien, maka harus didukung dengan sumber-sumber keuangan yang memadai. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskalnya, melalui : pengembangan aktivitas ekonomi berbasis komoditi unggulan daerah, dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkecil kesenjangan antar daerah serta meningkatkan kesejahteraan, dapat dilakukan dengan melakukan revitalisasi pertanian dari hulu sampai hilir untuk membantu daerah kabupaten/kota yang berbasis sektor primer (pertanian). (Sasana Hadi, 2006).

Belanja tidak langsung yang masih relatif lebih tinggi dalam struktur APBD dibandingkan dengan belanja langsung menjadikan multiplier efek belanja daerah terhadap kemajuan ekonomi daerah masih terbatas. Hasil penelitian Bastias (2010) menunjukkan bahwa dalam jangka pendek hanya variabel pengeluaran pemerintah atas transportasi yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan perumahan tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sementara dalam jangka panjang variabel pengeluaran pemerintah atas perumahan dan transportasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan bertanda positif, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan kesehatan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut Yuhayani (2008) menemukan bahwa ada Pengaruh yang signifikan antara Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja pemerintah Aceh tengah dengan Pendekatan *Balanced Scorecard*. Namun tidak mempunyai korelasi yang erat dengan Perspektif Pelayanan Masyarakat.

Walaupun terdapat peningkatan Angka IPM dan PDRB per kapita setelah adanya desentralisasi fiskal namun berdasarkan hasil penelitian Sianturi (2008) di Kabupaten Bogor justru Kinerja keuangan lebih baik sebelum desentralisasi fiskal dilaksanakan karena pada saat desentralisasi fiskal derajat desentralisasi fiskal dan derajat kemandirian lebih rendah daripada sebelum desentralisasi fiskal. Alokasi APBD untuk pelayanan publik masih rendah. Jumlah fasilitas memang semakin meningkat tetapi penyebarannya tidak merata.

Dengan demikian kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah terukur melalui kemampuan daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini berarti bahwa keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Pemerintah daerah diharapkan mampu menetapkan belanja daerah yang wajar, efisien dan efektif.

B. Kemiskinan

APBD kabupaten/kota yang besar bukanlah jaminan tingkat tingkat kemiskinan masyarakat akan menurun seiring dengan peningkatan APBD kabupaten/kota tersebut. Alokasi belanja yang tepat sasaran, efektif dan efisien untuk menanggulangi kemiskinan baik melalui kelompok belanja tidak langsung maupun belanja langsung merupakan kata kuncinya. Hasil penelitian Bank Dunia dan BRR NAD-Nias (2008) menunjukkan bahwa di Aceh, kabupaten-kabupaten dengan tingkat penerimaan yang tinggi bukan berarti bebas dari kemiskinan. Sebaliknya, menurut survei pada tahun 2004, di Aceh Utara yang kaya akan gas alam, hampir 35 persen dari jumlah penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Besarnya dana bantuan yang masuk juga sering disertai dengan apa yang dinamakan "*Dutch disease*" dan membahayakan daya saing ekonomi Aceh. Dengan besarnya penyaluran dana bantuan dan dana dari pemerintah pusat, tantangan bagi Aceh tampaknya bukan berupa kelangkaan sumber daya, melainkan bagaimana menghindari ancaman ganda dari "kutukan sumber daya alam", atau *Dutch disease* tersebut, dan bagaimana memanfaatkan dana tersebut secara efisien untuk memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan meningkatkan daya saing ekonomi.

Kesenjangan belanja pembangunan antara kabupaten/kota yang jumlahnya minimum dengan kabupaten/kota yang jumlahnya maksimum terbilang besar. Pada tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran juga mengalami kesenjangan yang cukup besar antara kabupaten/kota yang jumlahnya minimum dengan kabupaten/kota yang jumlahnya maksimum untuk tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran. (Setiyawati, 2007). Rendahnya capaian penurunan kemiskinan karena ketidaksinkronan atau kekurangtepatan data dalam pengukuran kemiskinan, kegiatan-kegiatan yang tidak bersinggungan dan berdampak langsung dengan kemiskinan dan pengangguran justru memiliki alokasi yang lebih besar dari pada kegiatan yang murni untuk masyarakat miskin dan pengangguran (Hastuti dan Rahutami, 2011). Tidak jalannya beberapa kebijakan dan program kemiskinan, serta masih adanya ego sektoral masing-masing SKPD pelaksana program penanggulangan kemiskinan. Anggaran penanggulangan kemiskinan yang rendah dan tidak sebanding dengan jumlah penduduk miskin (Novianto, 2012).

Menurut Sujito (2008) berbagai cara ditempuh oleh aktor-aktor lokal untuk mengatasi masalah kemiskinan di daerahnya, baik melalui program sektoral maupun kegiatan-kegiatan terintegrasi dalam skema pembangunan daerah. Penanggulangan kemiskinan dan langkah-langkah mereduksi keterbelakangan, khususnya perbaikan sistem pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar warga, nampaknya makin populer mengatasi deficit perubahan di hampir semua lini. Meskipun ada kecenderungan model duplikasi, tetapi tidak sedikit pula model-model inovasi kebijakan populis bermaksud membuat kebijakan sosial pro kaum miskin (pro poor) kebijakan-kebijakan sosial populis, seperti penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan gratis, menjadi konstruksi politik baru para pemimpin daerah. Dorongan ini mencerminkan keyakinan bahwa kesempatan mempromosikan kebijakan-kebijakan pro poor sangat terbuka di masa otonomi daerah.

Berbagai kebijakan/program pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan di daerah semuanya masih merupakan program yang dirumuskan oleh Pemerintah Pusat. Ketergantungan pada Pemerintah Pusat tersebut, selain dan formulasi kebijakan/program, juga dalam hal pembiayaan implementasi kebijakan/program pengentasan kemiskinan. Sebagian besar pembiayaan pengentasan kemiskinan masih dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Ketergantungan pembiayaan kebijakan/program dan Pemerintah Pusat, tersebut mencerminkan pula bahwa daerah belum memiliki komitmen yang kuat dalam pengentasan kemiskinan dan menggalang pembiayaan untuk itu. Lemahnya komitmen tersebut tercermin dan rendahnya alokasi APBD untuk pengentasan kemiskinan. Ketergantungan pembiayaan dan Pemerintah Pusat dan kecilnya alokasi APBD untuk pengentasan kemiskinan, menjadikan kecilnya penyediaan sumberdaya keuangan untuk keberhasilan implementasi kebijakan/program. Lemahnya komitmen dan kecilnya sumberdaya keuangan, merupakan sebagian variabel yang memberi pengaruh/sumbangan pada kedilnya kemampuan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan untuk menurunkan angka kemiskinan. Desentralisasi pemerintahan belum membawa pergeseran letakdimana terjadinya proses kebijakan (pemilihan intervensi) pengentasan kemiskinan dari pusat ke daerah.

C. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita dipengaruhi oleh PDRB dan jumlah penduduk, dengan kata lain pendapatan per kapita mencerminkan pendapatan rata-rata yang diperoleh di suatu daerah, sehingga jika pendapatan tersebut besar masyarakat pun cenderung memiliki pengeluaran yang lebih besar untuk kebutuhannya, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya (Kuncoro, 2004).

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu biasanya satu tahun, yang ditunjukkan dengan PDRB, baik atas harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan. Pendapatan perkapita menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya termasuk membayar pajak. Semakin besar tingkat pendapatan perkapita masyarakat mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak. (Ladjin N, 2008). Relatifnya rendahnya kemampuan daerah dalam menggali kapasitas pajak daerah di sebabkan karena rendahnya pendapatan perkapita, rendahnya distribusi pendapatan, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan relatif lemahnya kebijakan perpajakan daerah. (Syahelmi, 2008).

Wagner dalam Sirojuzilam (2009), mengembangkan teori dimana perkembangan pesentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap Produk Domestik Bruto. Dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat, terutama pengeluaran pemerintah untuk mengatur hubungan dalam masyarakat seperti: hukum, pendidikan, kebudayaan dan sebagainya.

Sejalan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah daerah dengan adanya desentralisasi. Hasil penelitian Taryono dan Ekwarso (2012), menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Riau periode 2008-2009 mengalami peningkatan. Proporsi pengeluaran bahan makanan turun dari 50,30 persen pada tahun 2008 menjadi 48,34 persen ditahun 2009 dan proporsi pengeluaran bahan non makanan meningkat dari 49,70 persen ditahun 2008 meningkat menjadi 51,66 persen di tahun 2009. Persentase jumlah penduduk pada golongan pengeluaran kelas menengah di Provinsi Riau mengalami peningkatan dari 38,88 persen pada tahun 2008 meningkat menjadi 51,06 persen pada tahun 2009.

III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau yang meliputi 9 Kabupaten dan 2 Kota.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi data belanja daerah, tingkat kemiskinan dan pendapatan regional perkapita. Data tersebut bersumber dari data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan instansi/lembaga lainnya.

C. Metode Analisis

Analisis deskriptif dilakukan terhadap variabel penelitian yaitu belanja daerah, tingkat kemiskinan dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diprosikan dengan pendapatan regional perkapita. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data yang telah dikumpulkan, antara lain tentang tendensi sentral, dispersi, simetris, dan lain-lain.

Selain itu, dalam penelitian ini untuk menguji perbedaan dua kelompok pada daerah penghasil migas dan bukan penghasil migas pada variabel belanja daerah (belanja tidak langsung dan belanja langsung), tingkat kemiskinan, dan pendapatan regional perkapita. Digunakan pendekatan statistik inferensial melalui uji statistik independent sampel t test yang terdapat pada program SPSS 19.0.

Selanjutnya, untuk kebutuhan analisis dalam penelitian ini digunakan data belanja daerah, tingkat kemiskinan, dan pendapatan regional perkapita dari 9 kabupaten dan 2 kota yang terdapat di Provinsi Riau selama periode 2007-2010. Kabupaten Kepulauan Meranti dalam analisis ini datanya masih bergabung dengan kabupaten induknya yaitu Kabupaten Bengkalis.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Belanja Daerah

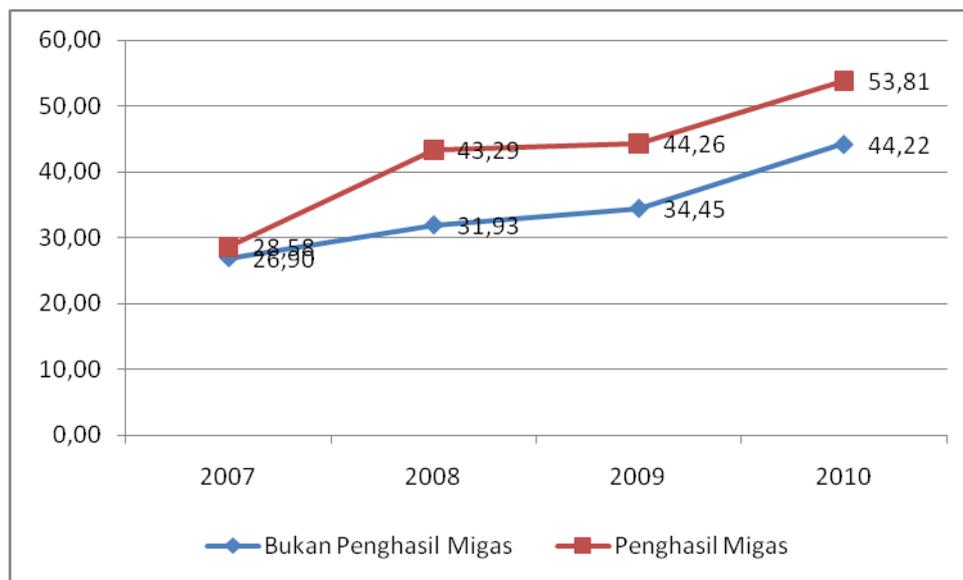
Desentralisasi fiskal yang dilaksanakan di Indonesia pada dasarnya merupakan desentralisasi dari sisi pengeluaran. Setiap daerah diberikan kebebasan untuk membelanjakan pendapatannya sesuai dengan prioritas dan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Sementara kontrol dari pemerintah pusat terhadap pengeluaran pemerintah daerah relatif masih terbatas. Hal tersebut dapat dilihat dari proporsi alokasi kelompok belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah cenderung masih tinggi dibandingkan kelompok belanja langsung. Peningkatan penerimaan daerah terutama dari Dana Bagi Hasil turut mendorong peningkatan belanja tidak langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Riau. Pada tahun 2007 belanja tidak langsung Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 614,66 milyar atau 20,96% dan meningkat menjadi Rp. 1.014,14 milyar atau 38,39% pada tahun 2010. Demikian juga pada Kabupaten Siak pada tahun 2007 belanja tidak langsung sebesar Rp. 346,59 milyar atau 13,83% meningkat menjadi Rp. 616,43 milyar atau 31,73% pada tahun 2010. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 : Belanja Tidak Langsung Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2007-2010

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010
1. Bengkalis	614.659	750.444	186.603	1.014.141
2. Indragiri Hilir	339.199	410.197	512.104	539.734
3. Indragiri Hulu	278.142	285.839	438.407	436.521
4. Kampar	565.854	605.402	670.510	747.799
5. Kuantan Singingi	399.315	387.726	500.128	486.119
6. Pelalawan	107.059	314.924	399.334	400.531
7. Rokan Hilir	491.602	423.830	533.404	472.938
8. Rokan Hulu	277.830	356.424	462.246	485.981
9. Siak	346.589	444.273	556.427	616.425
10. Dumai	199.428	241.296	302.304	332.074
11. Pekanbaru	538.786	459.768	536.260	598.918

Sumber : Kementerian Keuangan

Pada kabupaten/kota penghasil migas proporsi belanja tidak langsung relatif lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota bukan penghasil migas. Rata-rata alokasi belanja tidak langsung pada tahun 2007 untuk kabupaten/kota bukan penghasil migas sebesar 28,58% dan penghasil migas sebesar 26,90%. Pada tahun 2010 rata-rata alokasi belanja tidak langsung kabupaten/kota bukan penghasil migas meningkat lebih tinggi (53,81%) dari kabupaten/kota penghasil migas (44,22%).



Gambar 1 :
Ratio Rata-rata Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah Menurut Kabupaten/Kota Penghasil Migas dan Bukan Penghasil Migas Di Provinsi Riau Tahun 2007-2010

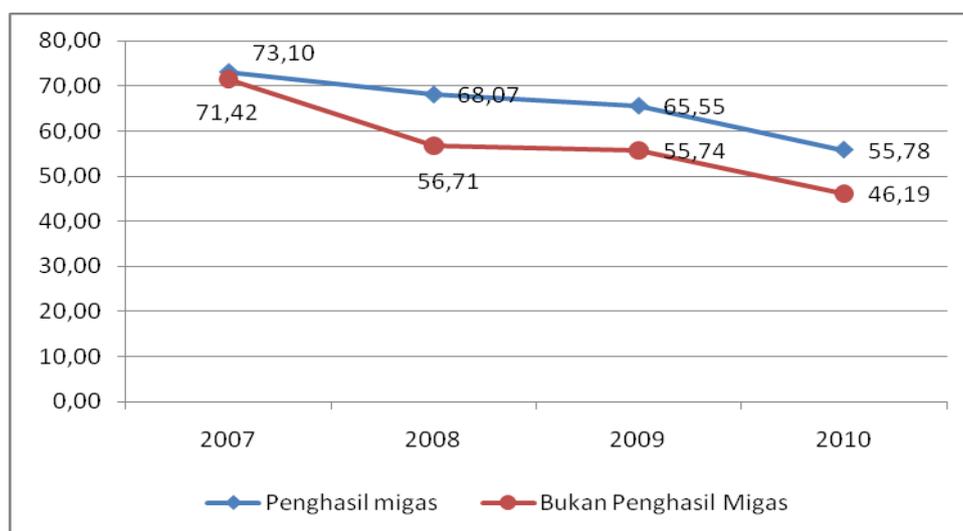
Alokasi belanja langsung yang lebih besar dalam struktur belanja daerah menjadi penting, mengingat alokasi belanja langsung terutama pada jalur belanja modal memiliki multiplier efek yang besar dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rata-rata alokasi belanja langsung kabupaten/kota di Provinsi Riau sudah diatas 50%. Namun demikian selama periode 2007-2010 trendnya menunjukkan penurunan. Pada tahun 2007 rata-rata belanja langsung kabupaten/kota di Provinsi Riau sebesar 72,64% dan terus menurun menjadi 53,17% pada tahun 2010. Perkembangan alokasi belanja langsung menurut kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2007-2010 dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2 : Belanja Langsung Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2007-2010

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010
1. Bengkalis	2.317.574	2.140.610	2.185.835	1.627.592
2. Indragiri Hilir	685.017	465.136	507.737	414.369
3. Indragiri Hulu	599.606	533.813	660.883	220.964
4. Kab. Kampar	881.646	942.008	761.834	684.176
5. Kuantan Singingi	837.076	402.121	587.204	360.041
6. Pelalawan	752.420	658.156	663.172	527.854
7. Rokan Hilir	1.489.517	1.246.162	1.363.127	1.155.178
8. Rokan Hulu	730.696	522.067	467.636	579.712
9. Siak	2.159.854	1.889.687	1.864.111	1.326.193
10. Dumai	782.426	470.004	524.341	368.460
11. Pekanbaru	663.667	746.470	721.227	669.151

Sumber : Kementerian Keuangan

Alokasi belanja tidak langsung yang lebih besar pada kabupaten/kota bukan penghasil migas menyebabkan alokasi untuk belanja langsung menjadi lebih rendah. Sementara itu, baik pada kabupaten/kota penghasil/bukan migas terdapat kecenderungan alokasi proporsi belanja langsung yang terus menurun selama periode 2007-2010.



Gambar 2 :
Ratio Rata-rata Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah Menurut Kabupaten/Kota Penghasil Migas dan Bukan Penghasil Migas Di Provinsi Riau Tahun 2007-2010

B. Kemiskinan

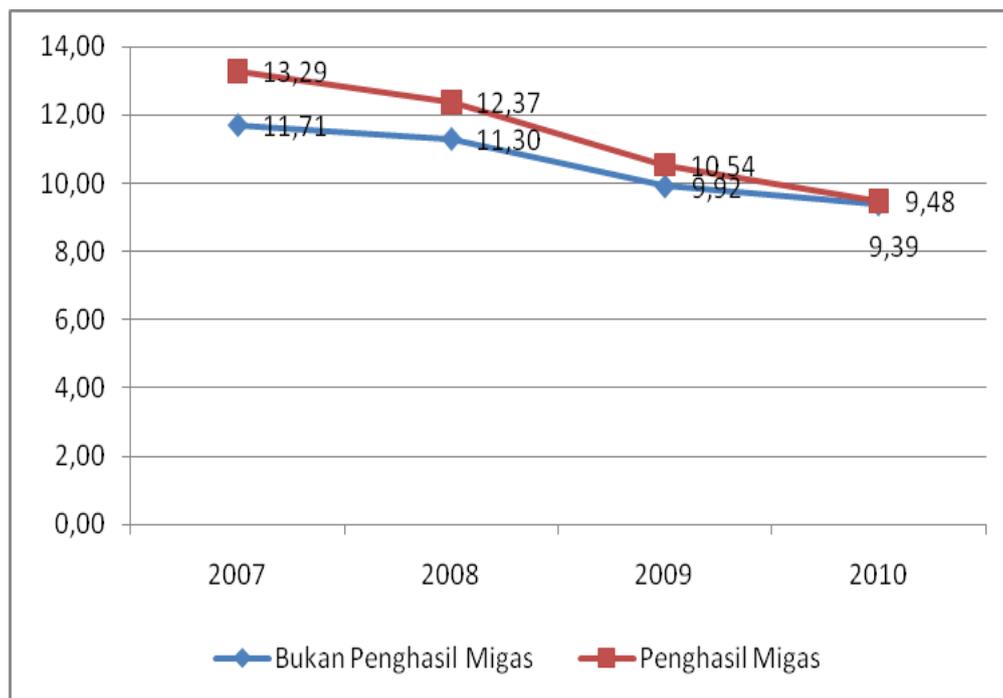
Penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terjadi karena keadaan alamnya yang miskin atau langka sumberdaya alam, sehingga produktivitas masyarakat menjadi rendah, sedangkan kemiskinan struktural terjadi karena alokasi sumberdaya yang ada tidak terbagi secara merata, meskipun sebenarnya jika total produksi yang dihasilkan dapat dibagi secara merata tidak akan terjadi kemiskinan. Secara umum tingkat kemiskinan penduduk kabupaten/kota di Provinsi Riau dari tahun 2007-2009 menunjukkan trend yang menurun. Persentase penduduk miskin Provinsi Riau turun dari 11,2 persen pada tahun 2007 menjadi 9,45 persen pada tahun 2009. Kabupaten dengan kinerja penurunan kemiskinan tertinggi adalah Rokan Hulu dengan kinerja penurunan kemiskinan sebesar 6,37 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3 : Tingkat Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2007-2009

Kabupaten Kota	Persentase Penduduk Miskin			
	2007	2008	2009	2010
1. Kuantan Singingi	19,03	16,51	14,42	12,57
2. Indragiri Hulu	14,63	12,05	10,25	8,9
3. Indragiri Hilir	14,57	13,19	11,11	9,41
4. Pelalawan	18,07	18,63	16,71	14,51
5. Siak	6,01	7,09	5,71	6,49
6. Kampar	10,73	11,45	10,04	10,47
7. Rokan Hulu	21,86	18,05	15,49	13,03
8. Bengkalis*	10,69	8,94	7,91	8,25
9. Rokan Hilir	9,41	10,59	9,32	9,3
10. Pekanbaru	2,24	3,63	3,92	4,2
11. Dumai	6,28	7,42	6,08	6,45

Sumber : BPS, Riau Dalam Angka 2008,2009 dan 2010

Perbandingan tingkat kemiskinan antara kabupaten/kota penghasil migas dan bukan penghasil migas di Provinsi Riau menunjukkan fakta bahwa rata-rata tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota penghasil migas lebih tinggi daripada rata-rata tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota bukan penghasil migas. Pada tahun 2007 rata-rata tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota penghasil migas sebesar 13,29% lebih tinggi dari kabupaten/kota bukan penghasil migas yaitu sebesar 11,71%. Kemampuan keuangan daerah yang lebih tinggi pada kabupaten/kota penghasil migas menjadikan kabupaten/kota tersebut mempunyai sumberdaya yang lebih besar dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Dampaknya rata-rata tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota penghasil migas pada tahun 2010 turun menjadi sebesar 9,48% yang mengejar kinerja penurunan kemiskinan pada kabupaten/kota bukan penghasil migas yaitu rata-rata sebesar 9,39% pada tahun yang sama.



Gambar 3 :
 Rata-rata Tingkat Kemiskinan
 Kabupaten/Kota Penghasil Migas dan Bukan Penghasil Migas
 Di Provinsi Riau Tahun 2007-2020

C. Kesejahteraan Masyarakat

Daerah-daerah yang kaya sumberdaya alam di Provinsi Riau mendapatkan berkah dana bagi hasil yang besar. Sehingga daerah tersebut mempunyai kemampuan keuangan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang memiliki sumberdaya alam terbatas. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota penghasil migas di Provinsi Riau yang diukur dari pendapatan regional perkapita (Rp. 8,5 juta) lebih rendah dari kabupaten/kota bukan penghasil migas (Rp. 9,68 juta). Demikian juga dengan kinerja peningkatan kesejahteraan masyarakat, pada kabupaten/kota penghasil migas lebih rendah daripada kabupaten/bukan penghasil migas. Rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota penghasil migas setiap tahun meningkat 3,16% sedangkan rata-rata peningkatan kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota bukan penghasil migas sebesar 5,72% setiap tahunnya.

Tabel 4 : Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2007-2010 (Dalam juta)

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010
1. Bengkalis	5.297	5.643	5.784	6.862
3. Indragiri Hulu	10.308	10.906	11.398	11.103
4. Kab. Kampar	6.391	6.805	7.078	6.794
5. Pelalawan	9.333	9.695	10.171	10.281
6. Rokan Hilir	6.470	6.469	6.764	7.450
7. Rokan Hulu	5.499	5.671	5.781	5.393
8. Siak	9.670	10.282	10.682	10.110
9. Pekanbaru	8.972	9.716	10.342	10.010
Penghasil Migas	7.743	8.148	8.500	8.500
10. Indragiri Hilir	8.230	8.716	9.166	10.149
11. Dumai	7.055	7.483	7.926	8.204
12. Kuantan Singingi	9.296	9.896	10.409	10.689
Bukan Penghasil Migas	8.194	8.698	9.167	9.681

Sumber : BPS

D. Uji Statistik

Hasil uji statistik dengan independent sample t test menunjukkan hasil seperti pada tabel group statistics, dan independent sample t test berikut :

Group Statistics					
Migasnomigas		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Miskin	Bukan Penghasil Migas	12	11,4200	4,33768	1,25218
	Penghasil Migas	32	10,5803	4,77201	,84358
Bl	Bukan Penghasil Migas	12	533661,0000	159029,90346	45907,97879
	Penghasil Migas	32	1054768,6875	598401,63259	105783,46307
Btl	Bukan Penghasil Migas	12	387468,6667	109202,47322	31524,03866
	Penghasil Migas	32	481808,4375	178006,20452	31467,34858
Ykapita	Bukan Penghasil Migas	12	8934,9167	1189,74111	343,44867
	Penghasil Migas	32	8222,8125	2096,72418	370,65197

Pada group statistics, rata-rata tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota bukan penghasil migas sebesar 11,42% dan penghasil migas 10,58%. Berdasarkan uji independent sample t test diketahui bahwa Sig. (2-tailed) sebesar $0,597 > 0,05$. Artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kemiskinan antara kabupaten/kota penghasil migas dan bukan penghasil migas.

Rata-rata belanja langsung pada kabupaten/kota bukan penghasil migas sebesar Rp. 533,66 milyar dan penghasil migas sebesar Rp. 1.054,77 milyar dengan Sig. (2-tailed) sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya terdapat perbedaan rata-rata belanja langsung antara kabupaten/kota penghasil migas dan bukan penghasil migas. Rata-rata belanja tidak langsung pada kabupaten/kota bukan penghasil migas sebesar Rp. 387,47 milyar dan penghasil migas sebesar Rp. 481,81 milyar dengan Sig. (2-tailed) sebesar $0,094 > 0,05$. Artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata belanja tidak langsung antara kabupaten/kota penghasil migas dan bukan penghasil migas.

Kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari rata-rata pendapatan perkapita pada kabupaten/kota bukan penghasil migas sebesar Rp. 8,9 juta dan penghasil migas sebesar Rp. 8,2 juta dengan Sig. (2-tailed) sebesar $0,168 > 0,05$. Artinya tidak terdapat perbedaan kesejahteraan antara kabupaten/kota penghasil migas dengan penghasil migas.

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	T	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Miskin	Equal variances assumed	,000	,984	,532	42	,597	,83969	1,57815	-2,34515	4,02453
	Equal variances not assumed			,556	21,667	,584	,83969	1,50983	-2,29430	3,97367
Bl	Equal variances assumed	17,877	,000	-2,958	42	,005	-521107,68750	176191,36068	-876676,24868	-165539,12632
	Equal variances not assumed			-4,519	39,798	,000	-521107,68750	115315,58253	-754205,99078	-288009,38422
Btl	Equal variances assumed	1,509	,226	-1,712	42	,094	-94339,77083	55115,19326	-205566,73389	16887,19223
	Equal variances not assumed			-2,118	32,421	,042	-94339,77083	44541,65511	-185022,02329	-3657,51837
ykapita	Equal variances assumed	20,628	,000	1,106	42	,275	712,10417	643,64945	-586,83302	2011,04135
	Equal variances not assumed			1,409	34,796	,168	712,10417	505,31166	-313,94812	1738,15645

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Rata-rata belanja langsung antara kabupaten/kota penghasil migas dan bukan penghasil migas berbeda (Sig. (2-tailed) sebesar 0,000). Sedangkan rata-rata belanja tidak langsung antara kabupaten/kota penghasil migas dan bukan penghasil migas tidak terdapat perbedaan (Sig. (2-tailed) sebesar 0,094).

Perbedaan rata-rata aloksi belanja langsung antara kabupaten/kota penghasil migas dengan bukan penghasil migas, tidak menyebabkan kinerja penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota penghasil migas lebih baik dari kabupaten/kota bukan penghasil migas.

B. Saran

Pemerintah kabupaten/kota perlu melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan koordinasi, sinergisitas, sinkronisasi dan menghilangkan ego sektoral, serta meningkatkan anggaran bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Dunia dan BRR NAD-Nias, 2008. Kajian Kemiskinan di Aceh 2008 : Dampak Konflik, tsunami, dan Rekonstruksi terhadap Kemiskinan di Aceh.
- Bastias DD, 2010. Skripsi : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hastuti R dan Rahutami AI, 2011. Akselerasi Pengurangan Kemiskinan Dan Pengangguran Melalui Sinergi Potensi, Program, Dan Anggaran Di Kabupaten Semarang. Majalah VISI FEB Unika Soegijapranata –Edisi XXIII – Oktober 2011
- Hendarmin, 2012. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal EKSOS* Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 hal 144 - 155 ISSN 1693 – 9093.
- Kuncoro. M, (2004). *Otonomi dan pembangunan daerah: Reformasi, perencanaan, strategi dan peluang*. Jakarta: Erlangga.

- Ladjin N, 2008. Tesis : Analisis Kemandirian Fiskal Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Propinsi Sulawesi Tengah). Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang
- Novianto E, 2012. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Socioscientia : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* Juni 2012, Volume 4 Nomor 2.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sasana Hadi, 2006. Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Pembangunan* Vol. 3 No. 2 / Desember 2006 : 145 – 170
- Setiyawati Anis, 2007. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran : Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Desember 2007, Vol. 4, No. 2 Hal 211-228
- Sianturi MRB, 2008. Skripsi : Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Sebelum Dan Pada Masa Otonomi Daerah. Program Studi Ekonomi Pertanian Dan Sumber Daya Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sirojuzilam, 2009. Disparitas Ekonomi Regional Dan Perencanaan Wilayah. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Regional Pada Fakultas Ekonomi, Diucapkan Di Hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Sujito A, 2008. Inisiatif Lokal dalam Kebijakan Sosial: Pelajaran dari Makasar. *Jurnal Demokrasi Sosial*. Vol. 2 No. 1 April-Juni 2008
- Syahelmi, 2008. Tesis : Analisis Elastisitas, Efisiensi, Dan Efektifitas Pad Sumatera Utara Dalam Era Otonomi Daerah. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Taryono dan Ekwarso H, 2012. Analisis Pengeluaran Dan Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2008 Dan 2009. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* Tahun II No. 5, Maret 2012.
- Wahyu DP, 2006. Perbandingan Kebijakan Publik Pemerintahan Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia Dalam Pengentasan Kemiskinan (Tinjauan Pendekatan Institusionalisme) *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. III, No. 1, April 2006
- Yuhayani N, 2008. Tesis : Pengaruh Implementasi Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah (Dengan Pendekatan Balanced Scorecard). Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan.